

# Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

A<sub>95</sub>



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1981







## Daftar Isi

	halaman
Pendahuluan .....	1
Petunjuk Belajar .....	1
Tujuan Belajar .....	2
Alat-alat Belajar .....	2
Bab I Pemerintahan Desa .....	3
Pertanyaan/tugas .....	7
Kunci Jawaban .....	8
Bab II Pemerintahan Pusat .....	9
Pertanyaan/tugas .....	15
Kunci Jawaban .....	16
Bab III Pemerintahan di Daerah .....	17
Pertanyaan/tugas .....	24
Kunci Jawaban .....	26
Bab IV Susunan Pemerintahan Negara Kita .....	27
Pertanyaan/tugas .....	31
Kunci Jawaban .....	32
Rangkuman .....	33
Tindak Lanjut .....	33
Kata-kata Inti .....	34



## Pendahuluan

Buku Paket A95 ini adalah buku pelajaran tentang susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bahan pelajaran berisikan pengetahuan umum tentang pemerintahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penyajiannya kami sampaikan dalam bentuk cerita dengan kata-kata yang sederhana dan mudah, dipahami.

Buku ini terdiri dari empat bab yaitu :

- Bab I Pemerintahan Desa
- Bab II Pemerintahan Pusat
- Bab III Pemerintahan di Daerah
- Bab IV Susunan Pemerintahan Negara Kita

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

## Petunjuk Belajar

- a. Sebelum membaca pelajaran ini, Saudara harus membaca tujuan belajar pada halaman berikut.
- b. Bacalah tiap pelajaran baik-baik sampai selesai.
- c. Jawablah pertanyaan pada kertas lain.
- d. Cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.
- e. Kalau ada jawaban Saudara yang salah, betulkanlah lebih dahulu, baru Saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya.
- f. Sediakanlah alat-alat belajar yang diperlukan.
- g. Setelah Saudara mempelajari buku ini, lakukanlah apa yang dianjurkan dalam tindak lanjut.



## Tujuan Belajar

Setelah Saudara mempelajari buku pelajaran susunan pemerintahan ini, Saudara akan dapat :

- a. Menjelaskan susunan pemerintahan di desa
- b. Menjelaskan susunan pemerintahan di pusat
- c. Menjelaskan susunan pemerintah di daerah

## Alat-alat Belajar

- a. Pensil atau alat tulis lainnya.
- b. Buku catatan atau buku tulis.
- c. Bagan susunan pemerintahan, di desa, di daerah dan di pusat.
- d. Peta wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

\* \* \*



## Bab I Pemerintahan Desa



Desa Sukamaju adalah desa yang subur dan makmur. Letaknya di daerah pegunungan. Meskipun jauh dari kota, desa itu adalah desa yang maju. Rakyatnya hidup senang. Masyarakatnya aman dan tenteram. Keadaan di desa itu serba teratur. Rumah-rumah dan jalan-jalannya bersih dan rapi. Sawah dan tegalan penuh dengan tanaman yang hijau subur.

Lihatlah bangunan di sudut perempatan jalan itu. Bangunan itu tampaknya lebih besar dari pada rumah-rumah di sekitarnya. Di halamannya berkibar bendera merah putih. Sebuah papan nama terpancang di depan bangunan yang besar itu. Pada papan nama itu tertera Balai Pemerintahan Desa Sukamaju. Sekarang kita mengetahui bangunan besar itu. Bangunan itu adalah Balai Pemerintahan Desa Sukamaju.



Balai pemerintahan tersebut adalah tempat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di desa itu. Apakah yang menjadi urusan pemerintahan dalam desa Sukamaju? Urusan pemerintahan di desa Sukamaju banyak sekali. Urusan itu menyangkut kepentingan seluruh masyarakat desa Sukamaju. Mereka berkepentingan untuk memajukan pendidikan. Mereka juga ingin agar pertanian di desa itu maju. Peternakan sedang mulai berkembang juga. Kesehatan, kerajinan rumah tangga, koperasi, pendidikan dan sebagainya perlu sekali bagi kepentingan masyarakat desa.

Kepentingan masyarakat desa perlu diurus dan diatur. Jika tidak diurus atau diatur, kepentingan masyarakat itu tidak akan tercapai. Orang-orang biasanya hanya mengurus kepentingan mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu kepentingan masyarakat desa perlu diurus, agar seluruh masyarakat desa mencapai apa yang dikehendakinya. Mereka semuanya ingin hidup bahagia dan sejahtera.

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan seluruh masyarakat desa telah berdiri pemerintahan desa. Jadi, pemerintahan desa adalah lembaga yang mengatur dan mengurus kepentingan seluruh masyarakat desa itu.

Pemerintahan desa Sukamaju dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang menjadi Kepala Desa Sukamaju adalah Bapak Wirawan. Beliau adalah seorang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga adalah seorang yang jujur dan bijaksana. Oleh karena itu, beliau dicintai dan dihormati oleh rakyatnya.

Dalam memegang tampuk pemerintahan desa, Bapak Wirawan selaku kepala desa didampingi oleh Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa bisa disingkat sebutannya menjadi LMD. Kepala desa bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa merupakan Pemerintah Desa.



Mereka adalah orang-orang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.

Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permufakatan yang anggota-anggotanya terdiri dari kepala-kepala dusun, pemimpin lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat di desa itu. Mereka bermusyawarah mencari permufakatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa mencakup pembangunan-pembangunan di desa itu. Kalau hal-hal mengenai pembangunan di desa itu sudah dimufakati dalam LMD, pelaksanaannya akan lancar. Jika rencana pembangunan itu sudah dimufakati oleh tokoh-tokoh masyarakat berarti sudah mencerminkan aspirasi masyarakat desa tersebut.

Siapakah yang dimaksud dengan kepala dusun? Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa pada wilayah yang disebut dusun. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa. Mengingat pertimbangan luas wilayahnya, jumlah penduduknya, letaknya dan sebagainya, di desa dapat dibentuk dusun-dusun. Desa Sukamaju mempunyai empat dusun, yaitu Cisarongge, Cipatik, Gerang, dan Rancakuda.

Tiap-tiap dusun dipimpin oleh kepala dusun sebagai pelaksana tugas kepala desa. Dengan demikian kepala dusun membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala dusun merupakan unsur perangkat desa.

Pemimpin-pemimpin lembaga kemasyarakatan adalah pemimpin dari perkumpulan kegiatan masyarakat. Perkumpulan kegiatan masyarakat itu ada yang berupa kesenian, koperasi, pengajian, kelompok belajar, dan sebagainya. Tiap-tiap lembaga kemasyarakatan itu mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepengurusannya. Jika Saudara sendiri duduk dalam kepengurusan suatu lembaga



kemasyarakatan, berarti Saudara adalah pemimpin lembaga kemasyarakatan itu.

Sebagai pemuka masyarakat dapat disebutkan, misalnya guru, ustad, pendeta, dan cendikiawan. Dukun dan kiyai pun dapat merupakan pemuka masyarakat karena mereka dipercayai oleh orang banyak. Mereka itu semua merupakan unsur-unsur LMD Permusyawaratan dalam LMD dipimpin oleh kepala desa yang bertindak selaku Ketua Lembaga Musyawarah Desa.

Bapak Wirawan selaku kepala desa mempunyai tugas yang berat dan banyak sekali. Dalam melaksanakan tugasnya yang berat itu, beliau mempunyai staf pembantu. Staf pembantu kepala desa adalah sekretariat desa. Sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan. Karena kedudukannya, sekretaris desa dapat mewakili kepala desa apabila berhalangan.

Sekretariat desa bersama dengan kepala-kepala dusun merupakan perangkat desa. Perangkat desa membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Pemerintahan desa Sukamaju berjalan tertib dan lancar. Hal ini berkat pimpinan kepala desanya yang arif bijaksana, serta bantuan dari perangkat desa dan unsur-unsur pemerintah desa lainnya. Seluruh masyarakat desa itu dengan taat mengikuti bimbingan pemerintah desanya. Mereka mentaati ketentuan yang menjadi keputusan desa. Dengan senang hati mereka bergotong royong melaksanakan keputusan desa itu, karena mengenai pembangunan yang bermanfaat bagi mereka.

Desa Sukamaju sekarang bertambah maju. Pembangunan sedang giat dilaksanakan, untuk menuju masyarakat yang lebih bahagia dan sejahtera.

\* \* \*



## Pertanyaan/tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap paling tepat dan tuliskan pada kertas lain!

1. Pemerintahan desa adalah :
  - a. Lembaga yang mengurus dan mengatur desa.
  - b. Orang-orang yang menguasai desa.
  - c. Urusan mengenai orang-orang desa.
2. Pemerintah desa terdiri dari :
  - a. Perangkat desa dan kepala desa.
  - b. Pemuka-pemuka masyarakat desa.
  - c. Kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan merupakan :
  - a. Perkumpulan kegiatan masyarakat.
  - b. Kegiatan banyak orang.
  - c. Himpunan masyarakat.
4. Pembantu kepala desa adalah :
  - a. Kepala dusun.
  - b. Perangkat desa.
  - c. Sekretaris desa.
5. Desa Sukamaju terletak di :
  - a. kota,
  - b. pegunungan,
  - c. pantai,

Jawablah pertanyaan dibawah ini pada kertas lain!

6. Siapakah yang memimpin pemerintahan desa Sukamaju?
7. Bagaimana sifat-sifat seorang kepala desa?
8. Apa nama bagian wilayah desa?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.



## Kunci Jawaban

1. a. Lembaga yang mengurus dan mengatur desa.
2. c. Kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa.
3. a. Perkumpulan kegiatan masyarakat.
4. b. Perangkat desa.
5. c. pegunungan.
6. Bapak Wirawan selaku kepala desa.
7. Bertakwa, jujur, bijaksana, dan sebagainya.
8. dusun

Apabila jawaban Saudara masih ada yang salah, betulkan lebih dahulu. Kemudian baru Saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

\* \* \*



## Bab II

### Pemerintahan Pusat

Pemerintahan desa Sukamaju mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa itu. Desa Sukamaju hanyalah wilayah kecil jika dibandingkan dengan negara kita. Desa itu merupakan bagian wilayah negara kita yang sangat luas. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara kita sangat luas dan penduduknya sangat banyak. Dari Sabang sampai ke Merauke adalah wilayah negara kita. Sedangkan penduduk negara kita lebih dari 140 juta orang banyaknya. Itulah bangsa Indonesia yang besar. Kita termasuk bangsa Indonesia yang besar itu.

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang tinggi. Mereka ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa cita-cita itu merupakan cita-cita kita juga, karena kita adalah satu bangsa.

Masyarakat adil dan makmur itu perlu diusahakan perwujudannya. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, negara kita mempunyai pemerintahan. Pemerintahan negara kita berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan.

Pemerintahan dalam negara kita telah disusun secara teratur. Pada tingkat yang tertinggi disebut pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat bertugas mengurus dan mengatur seluruh bangsa dan negara kita.

Pemerintahan pusat berkedudukan di ibu kota negara. Ibu kota negara kita adalah Jakarta.

Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden. Oleh karena itu, presiden disebut juga sebagai kepala negara. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Yang menjadi presiden kita sekarang adalah Bapak





Soeharto, sedangkan wakil presiden kita, Bapak Adam Malik.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Bapak Soeharto selaku presiden mempunyai kewajiban yang berat. Pembangunan dalam segala bidang perlu diurus dan diaturnya. Oleh karena itu, beliau memerlukan pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu presiden yang terutama adalah menteri-menteri. Presiden dengan pembantu-pembantunya itu merupakan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat atau pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi seluruh bangsa dan negara kita.

Menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden terdiri dari beberapa orang. Menteri-menteri itu telah diatur dan disusun kedudukan dan tugas-tugasnya. Mereka merupakan suatu himpunan yang bekerja di bawah presiden.



Himpunan atau kelompok menteri yang bekerja di bawah presiden dinamakan kabinet. Kabinet pemerintahan kita sekarang adalah Kabinet Pembangunan III.

Menteri-menteri itu mengurus dan mengatur berbagai macam urusan yang menyangkut pembangunan negara kita. Masing-masing urusan menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan. Menteri Kesehatan mengurus tentang urusan kesehatan di negara kita. Banyak lagi menteri-menteri yang lain dengan urusan yang dipegangnya.

Untuk mengetahui kedudukan dan tugas menteri-menteri itu, kita perlu melihat susunan Kabinet Pembangunan III. Menteri-menteri dalam susunan Kabinet Pembangunan III dapat digolongkan dalam :

menteri-menteri yang tidak memimpin departemen,  
menteri yang memimpin departemen; dan  
menteri muda.

Marilah sekarang kita perhatikan nama-nama menteri tersebut sesuai dengan penggolongannya.

A. Menteri yang tidak memimpin departemen :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Bapak M. Panggabean, Jenderal TNI.
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri ( Ekuin )/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) yaitu Bapak Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yaitu Bapak Surono, Jenderal TNI.
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur, Negara ( PAN )/ Wakil Ketua Bappenas yaitu Bapak Dr. J.B. Sumarlin.
5. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ( PPLH ), yaitu Bapak Prof. Dr. Emil Salim.



6. Menteri Negara Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie.
7. Menteri/Sekretaris Negara, yaitu Bapak Sudharmono, S.H ; Letnan Jenderal TNI.

B. Menteri yang memimpin departemen :

1. Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Amirmachmud, memimpin Departemen Dalam Negeri.
2. Menteri Luar Negeri, yaitu Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, memimpin Departemen Luar Negeri.
3. Menteri Hankam/Pangab yaitu Bapak Jenderal TNI M. Jusuf, memimpin Departemen Hankam
4. Menteri Kehakiman, yaitu Bapak Mudjono S.H., memimpin Departemen Kehakiman.
5. Menteri Penerangan, yaitu Bapak Ali Murtopo, memimpin Departemen Penerangan.
6. Menteri Keuangan, yaitu Bapak Prof. Dr. Ali Wardana, memimpin Departemen Keuangan.
7. Menteri Perdagangan dan Koperasi, yaitu Bapak Dr. Radius Prawiro, memimpin Departemen Perdagangan dan Koperasi.
8. Menteri Pertanian, yaitu Bapak Prof. Dr. Sudarsono Hadisapoetro, memimpin Departemen Pertanian.
9. Menteri Perindustrian, yaitu Bapak Ir. Suhud, memimpin Departemen Perindustrian.
10. Menteri Pertambangan dan Energi, yaitu Bapak Prof. Dr. Subroto, memimpin Departemen Pertambangan dan Energi.
11. Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Bapak Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa, memimpin Departemen Pekerjaan Umum.



12. Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Rusnin Nuryadin ( Marsekal TNI ), memimpin Departemen Perhubungan.
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Bapak Prof. Dr. Harun Alrasyid Zain, memimpin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Daud Yusuf, memimpin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Menteri Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Suwardjono Suryaningrat, memimpin Departemen Kesehatan.
16. Menteri Agama, yaitu Bapak R. Alamsyah Ratu Prawiranegara, memimpin Departemen Agama.
17. Menteri Sosial, yaitu Sapardjo, memimpin Departemen Sosial.

C. Menteri Muda :

1. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan, yaitu Bapak Ir. Achmad Affandi, diperbantukan kepada Menteri Pertanian.
2. Menteri Muda Urusan Koperasi yaitu Bapak Bustanul Arifin S.H. diperbantukan kepada Menteri Perdagangan dan Koperasi.
3. Menteri Muda Urusan Transmigrasi, yaitu Bapak Martono, diperbantukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, yaitu Bapak Drs. Cosmas Batubara, diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
5. Menteri Muda Urusan Pemuda, yaitu Bapak dr. Abdul Gafur, diperbantukan kepada Menteri P dan K.



6. Menteri Muda Urusan Peranan wanita, yaitu Ibu L. Sutanto S.H. diperbantukan kepada Menko Kesejahteraan Rakyat.

Dengan memperhatikan susunan Kabinet Pembangunan III itu, kita mengetahui berbagai urusan yang ditangani oleh pemerintah kita. Urusan-urusan tersebut merupakan bidang-bidang pembangunan dalam negara kita. Dengan demikian, pemerintah melaksanakan pembangunan di seluruh negara kita.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita dilaksanakan secara bertahap dan berencana. Artinya pembangunan itu diatur dan diurus dengan sebaik-baiknya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan itu dapat mewujudkan segera cita-cita bangsa dan masyarakat kita. Dengan pembangunan itu kita semua sedang menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

\* \* \*



## Pertanyaan/tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap tepat dan tuliskan pada kertas lain!

1. Nama negara kita secara lengkap adalah . . . .
  - a. Republik Indonesia.
  - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Negara Indonesia
2. Pemerintah pusat berkedudukan di . . . .
  - a. Yogyakarta.
  - b. Ibu kota negara.
  - c. Daerah Khusus Ibu kota.
3. Pemerintahan pusat terdiri dari . . . .
  - a. presiden bersama wakil presiden.
  - b. presiden bersama menteri-menteri.
  - c. presiden bersama pembantu-pembantunya.
4. Wakil Presiden bertugas adalah . . . .
  - a. membantu presiden.
  - b. dibantu presiden.
  - c. pembantu presiden.
5. Kabinet sekarang disebut . . . .
  - a. Kabinet Pembangunan III.
  - b. Kabinet Pembangunan II.
  - c. Kabinet Pembangunan I.

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain!

6. Apakah yang menjadi tugas menteri-menteri ?
7. Siapakah yang menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III ?
8. Bagaimanakah pembangunan negara kita dilakukan?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.



## Kunci Jawaban

1. b. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. b. Ibu kota Negara.
3. c. Presiden bersama pembantu-pembantunya.
4. a. membantu presiden.
5. a. Kabinet Pembangunan III.
6. Menteri-menteri mengurus bidang pembangunan masing-masing .
7. Bapak R. Alamsyah Ratu Prawiranegara.
8. Dilakukan secara bertahap dan berencana.

Apabila jawaban Saudara masih ada yang salah, betulkan lebih dahulu. Kemudian baru Saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

\* \* \*



### Bab III

## Pemerintahan di Daerah

PETA WILAYAH NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA



Negara kita mempunyai wilayah yang luas sekali. Ribuan pulau membentuk wilayah Negara Republik Indonesia. Lihatlah peta di atas. Peta itu adalah peta wilayah negara kita.

Untuk melaksanakan pembangunan, negara kita dibagi dalam daerah-daerah. Pembagian daerah-daerah itu maksudnya untuk menentukan batas-batasnya. Dengan adanya pembagian daerah tersebut, pembangunan dapat dilaksanakan pada daerah yang tertentu batas-batasnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan di daerahnya.



Pembagian negara kita dalam daerah-daerah didasarkan atas pembagian menurut wilayah administratif dan menurut daerah otonom. Wilayah administratif sering disebut *wilayah*. Sedang daerah otonom biasa disebut orang *daerah*.

Marilah kita lihat pembagian daerah negara kita dalam wilayah-wilayah. Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat di daerah. Perangkat pemerintah (pusat) itu bekerja di daerah mengurus urusan pemerintahan.

Perangkat pemerintah yang bekerja di satu wilayah saja cukup banyak. Mereka adalah perangkat dari departemen-departemen yang ditempatkan di wilayah itu. Di samping itu ada perangkat dari lembaga-lembaga Pemerintah yang bukan berasal dari departemen. Perangkat pemerintah tidak lain dari pada pejabat-pejabat pemerintah, atau pegawai-pegawai pemerintah. Mereka melaksanakan urusan pemerintah dalam wilayah yang bersangkutan. Masih ingatkah Saudara, apa dimaksud dengan urusan pemerintahan? Hal itu tidak lain daripada pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah berjalan sebaik-baiknya, perlu ada yang memimpin. Yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan di wilayah adalah kepala wilayah. Kepala wilayah bersama dengan pejabat-pejabat pemerintah di wilayah itu merupakan unsur pemerintah wilayah.

Bagaimana pembagian menurut wilayah itu? Negara kita terbagi dalam wilayah-wilayah besar dan kecil. Wilayah-wilayah itu telah disusun secara tegak lurus. Artinya, wilayah yang di atasnya membawahi wilayah yang di bawahnya. Cobalah perhatikan susunan wilayah dalam negara kita itu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan ibu kota negara. Wilayah



propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota madya. Wilayah kabupaten dan kota madya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan. Dalam wilayah kabupaten, jika perlu dapat dibentuk kota administratif. Kota administratif itu dapat terdiri dari beberapa wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam wilayah-wilayah desa. Desa adalah wilayah yang mempunyai lembaga pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Masih ingatkah Saudara dengan pemerintahan desa Sukamaju? Jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, desa merupakan wilayah yang terkecil. Wilayah yang terbesar di daerah adalah propinsi.

Pada tiap-tiap wilayah ada kepala wilayahnya yang memimpin pemerintahan wilayah itu. Sebutan kepala wilayah untuk masing-masing wilayah berlainan. Mungkin Saudara pernah mendengarnya. Kepala wilayah propinsi dan ibu kota negara disebut gubernur. Selanjutnya nama kepala-kepala wilayah lainnya adalah :

Kepala wilayah kabupaten disebut bupati;  
kepala wilayah kota madya disebut Walikota madya,  
kepala wilayah kota administratif disebut walikota;  
kepala wilayah kecamatan disebut camat; dan  
kepala wilayah desa disebut kepala desa.

Untuk sebutan kepala desa, di tempat-tempat lain masih berbeda-beda. Bagaimana sebutan untuk kepala desa di tempat Saudara?

Kita mengetahui bahwa susunan wilayah-wilayah itu adalah tegak lurus. Oleh karena itu kepala wilayah yang di atasnya membawahi kepala wilayah yang di bawahnya. Sudah tentu kepala wilayah yang tertinggi adalah kepala negara. Yaitu Bapak Presiden Soeharto. Sekarang kita mengetahui mana disebut atasan dan yang mana bawahan. Kepala negara membawahi gubernur. Gubernur mem-



bawahi bupati dan walikotamadya. Bupati atau walikotamadya membawahi camat. Bagi kabupaten yang mempunyai kota administratif, bupati membawahi walikota, dan camat membawahi kepala desa.

Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah, kepala wilayah yang bersangkutan harus mendapatkan wewenang lebih dahulu dari atasannya. Dengan wewenang yang dilimpahkan dari atasannya, barulah kepala wilayah berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan wilayahnya. Pelimpahan wewenang artinya pemberian tugas dari atasan. Marilah kita lihat jalannya pelimpahan wewenang tersebut.

Presiden selaku pemimpin pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada gubernur, dan gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada bupati dan walikotamadya. Bupati atau walikotamadya dapat melimpahkan wewenangnya kepada camat. Bupati juga dapat melimpahkan wewenangnya kepada walikota dan camat dapat melimpahkan wewenangnya kepada kepala desa.

Sekarang kita telah mengetahui jalannya pemerintahan melalui jalur pembagian wilayah. Kini perlu diketahui jalannya pemerintahan negara kita melalui jalur pembagian daerah otonom. Apakah yang disebut daerah otonom itu? Daerah otonom adalah wilayah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak mengurus rumah tangganya itu tidak terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti diatur oleh pemerintah pusat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Di antara Saudara mungkin ada yang belum mengetahui urusan rumah tangga. Bagi yang sudah berkeluarga, tentulah mengetahui artinya urusan rumah tangga. Mengurus rumah tangga itu memang sulit. Kita sering kali pusing karena memikirkan rumah tangga. Kalau begitu, apakah urusan



rumah tangga itu? Urusan rumah tangga adalah bagaimana mengatur keluarga supaya hidup bahagia. Agar rumah tangga kita tenang, tentram dan bahagia, kita perlu mencukupi keperluan rumah tangga kita. Pendapatan keluarga harus ada pengeluarannya pun harus diatur. Uang yang kita punyai tidak seluruhnya dibelikan baju ibu. Anak-anak juga perlu dibelikan buku untuk sekolah, dan sebagainya.

Urusan rumah tangga yang menjadi urusan daerah otonom itu pun sama halnya seperti dalam keluarga. Yaitu bagaimana mengurus kesejahteraan masyarakat daerah itu. Sudah barang tentu banyak sekali urusan-urusan yang harus diatur oleh daerah. Urusan itu menjadi urusan pemerintah daerah tersebut. Yang wajib mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Kepala daerah dirangkap oleh kepala wilayah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan wakil-wakil rakyat di daerah itu. Mereka mengurus urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerahnya, dibawah pimpinan kepala daerah.

Wilayah-wilayah manakah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri? Saudara tentu masih ingat tentang pembagian wilayah negara kita. Wilayah yang berkedudukan daerah otonom adalah wilayah propinsi dan ibu kota negara serta wilayah kabupaten dan kota madya. Daerah otonom sering hanya disebut daerah.

Untuk wilayah propinsi dan ibu kota negara berkedudukan sebagai daerah tingkat I ( Dati I ). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota madya sebagai daerah tingkat II ( Dati II ). Oleh karena itu, propinsi Sumatera Utara yang juga adalah daerah tingkat I, biasa disebut Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Ciamis yang juga adalah daerah tingkat II, lazim disebut Kabupaten



Daerah Tingkat II Ciamis. Untuk ibu kota negara biasa disebut Daerah Khusus Ibu Kota Dati I Jakarta.

Kepala daerah adalah kepala wilayah. Berarti, gubernur adalah kepala daerah tingkat I. Bupati adalah kepala daerah tingkat II. Walikota madya adalah kepala daerah tingkat II. Oleh karena itu, gubernur yang juga kepala daerah tingkat I, biasa disebut Gubernur Kepala daerah Tingkat I. Bupati disebut Bupati Kepala daerah tingkat II. Walikota madya yang adalah Kepala daerah tingkat II disebut walikota madya Kepala daerah tingkat II.

Sebagai unsur dalam pemerintahan daerah, pada tiap-tiap daerah itu terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD tingkat I). Pada daerah tingkat (DPRD tingkat II). Bersama dengan kepala daerah, mereka mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di daerahnya. Urusan pemerintahan itu menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

Melihat kedudukannya, daerah tingkat I mempunyai tingkat kedudukan yang lebih tinggi daripada daerah tingkat II. Mengapa demikian? Karena propinsi membawahi kabupaten dan kota madya. Dengan kedudukannya yang lebih tinggi, daerah tingkat I dapat menugaskan tugas pembantuan kepada daerah tingkat II. Sudah tentu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan pemerintah tertinggi, dapat menugaskan tugas pembantuan pada daerah tingkat I dan tingkat II. Tugas pembantuan adalah tugas yang ditugaskan kepada salah satu daerah untuk turut serta mengurus urusan pemerintahan. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan bantu-membantu.

Demikianlah pengaturan pemerintahan di daerah. Melalui pemerintahan di daerah, pembangunan negara kita menyebar sampai ke seluruh negara kita. Kita telah merasakannya sebagai kemajuan-kemajuan yang terlihat seka-



rang. Dengan pembangunan yang diatur oleh pemerintah, kehidupan negara dan bangsa kita akan bertambah makmur dan sejahtera.

\* \* \*

2. Wilayah adalah ...

- a. lingkungan daerah.
- b. lingkungan kerja di daerah.
- c. lingkungan masyarakat daerah.

3. Pemerintah wilayah terdiri dari ...

- a. pejabat pemerintah dipimpin kepala wilayah.
- b. seluruh pejabat departemen di daerah.
- c. pejabat dan pegawai pemerintah.

4. Daerah otonom adalah ...

- a. daerah yang berhak mengurus rumah tangganya.
- b. wilayah yang berhak mengurus rumah tangganya.
- c. wilayah yang mengurus rumah tangganya.

5. Pemerintah daerah terdiri dari ...

- a. kepala daerah bersama pembantu-pembantu.
- b. kepala wilayah dan kepala daerah.
- c. kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



### Pertanyaan/tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap tepat, dan tuliskan pada kertas lain!

1. Pemerintahan di daerah bertugas . . . .
  - a. mengurus pembangunan di daerahnya.
  - b. mengurus pembangunan di daerah-daerah.
  - c. mengurus pembangunan seluruh daerah.
2. Wilayah adalah . . . .
  - a. lingkungan daerah.
  - b. lingkungan kerja di daerah.
  - c. lingkungan masyarakat daerah.
3. Pemerintah wilayah terdiri dari . . . .
  - a. pejabat pemerintah dipimpin kepala wilayah.
  - b. seluruh pejabat departemen di daerah.
  - c. pejabat dan pegawai pemerintah.
4. Daerah otonom adalah . . . .
  - a. daerah yang berhak mengurus rumah tangganya.
  - b. wilayah yang berhak mengurus rumah tangganya
  - c. wilayah yang mengurus rumah tangganya.
5. Pemerintah daerah terdiri dari . . . .
  - a. kepala daerah bersama pembantu-pembantunya.
  - b. kepala wilayah dan Kepala daerah.
  - c. kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain!

6. Apakah sebutan untuk kepala wilayah ibukota negara?
7. Sebutkan wilayah yang merupakan daerah!
8. Apakah sebutan kepala wilayah kota administratif?

Samakanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.

\* \* \*



### Kunci Jawaban

1. a. mengurus pembangunan di daerahnya.
2. b. lingkungan kerja di daerah.
3. a. pejabat pemerintah dipimpin kepala wilayah.
4. b. Wilayah yang berhak mengurus rumah tangganya.
5. c. kepala daerah bersama DPRD.
6. gubernur.
7. propinsi dan ibukota negara sebagai daerah tingkat I.  
Kabupaten dan kota madya sebagai daerah tingkat II.
8. walikota.

Apabila jawaban Saudara masih ada yang salah, betulkan lebih dahulu. Kemudian baru Saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

\* \* \*



## Bab IV

### Susunan Pemerintahan Negara Kita

Kita telah maklum bahwa pemerintahan dalam negara kita telah disusun dengan teratur. Susunan itu mengingatkan kita pada sebuah gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi mempunyai banyak tingkat. Pemerintahan negara kita juga bertingkat-tingkat. Meskipun bertingkat-tingkat, tidak terpisah-pisah. Susunan pemerintahan negara kita berada dalam satu naungan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Marilah kita lihat tingkat demi tingkat susunan pemerintahan negara kita. Antara tingkat yang satu dengan tingkat lainnya dihubungkan oleh ikatan tanggung jawab. Kita mulai dari tingkat yang paling bawah.

Tingkat pemerintahan yang terbawah adalah pemerintahan desa. Semuanya tentu sudah tahu pemerintahan desa Sukamaju. Sebab kita sendiri sering datang ke Balai Pemerintahan Desa di tempat kita sendiri. Bapak Kepala Desa tampak sibuk memimpin pemerintahan desanya. Beliau bertanggung jawab membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kepala desa tidak boleh menyimpang dari cita-cita dan harapan bangsanya.

Karena wilayah desa berada di bawah kecamatan, maka kepala desa bertanggung jawab kepada camat, atas pemerintahan di desanya. Camat adalah atasan langsung kepala desa. Sebagai pemerintah desa, kepala desa perlu memberikan keterangan tentang kebijaksanaannya kepada masyarakatnya. Keterangan itu diberikan melalui Lembaga Musyawarah Desa.

Di atas pemerintahan desa terdapat pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan mengurus sejumlah desa yang berada di bawahnya. Pimpinan pemerintahan



kecamatan adalah camat. Camat bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di kecamatannya. Pertanggung jawaban camat diberikan kepada bupati kepala daerah tingkat II, jika kecamatan itu berada di kabupaten dati II. Atau kepada walikota madya kepala daerah tingkat II, jika kecamatan itu berada di kota madya dati II. Pertanggung jawaban camat mungkin diberikan kepada walikota, jika wilayah kecamatannya berada di dalam kota administratif.

Meningkat dari kecamatan, kita sampai pada tingkat pemerintahan kabupaten daerah tingkat II atau pemerintahan kota madya daerah tingkat II. Yang bertanggung jawab pada pemerintahan kabupaten dati II adalah bupati kepala daerah tingkat II. Sedangkan yang bertanggung jawab pada pemerintahan kota madya daerah tingkat II adalah walikota madya kepala daerah tingkat II. Pertanggung jawaban diberikan kepada gubernur kepala daerah tingkat I sebagai atasan mereka. Mengenai pertanggungjawaban walikota dalam memimpin pemerintahan kota administratif, cukup diberikan melalui bupati kepala daerah tingkat II yang bersangkutan. Sebagai kepala daerah tingkat II, bupati atau walikota madya harus memberikan keterangan sebagai pertanggung jawaban kebijaksanaannya kepada DPRD pada tiap-tiap daerahnya.

Sekarang kita membicarakan tingkat pemerintahan propinsi daerah tingkat I. Pemerintahan propinsi daerah tingkat I mengurus dan mengatur beberapa kabupaten dati II dan kota madya dati II. Contohnya, Propinsi Dati I Jawa Barat membawahi 20 kabupaten dati II dan 4 kota madya dati II.

Pimpinan dalam pemerintahan propinsi daerah tingkat I adalah gubernur kepada daerah tingkat I. Dalam tindakannya memimpin pemerintahan di daerahnya, gubernur ber-



tanggung jawab kepada presiden. Pertanggungjawabannya itu disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.

Sebagai kepala daerah, gubernur kepala daerah (KDH) tingkat I wajib memberikan keterangan yang jelas kepada DPRD tingkat I atas segala kebijaksanaannya dalam memimpin pemerintahan. Maksudnya, agar wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPRD tingkat I itu mengetahui alasan gubernur KDH tingkat I dalam menjalankan pemerintahannya.

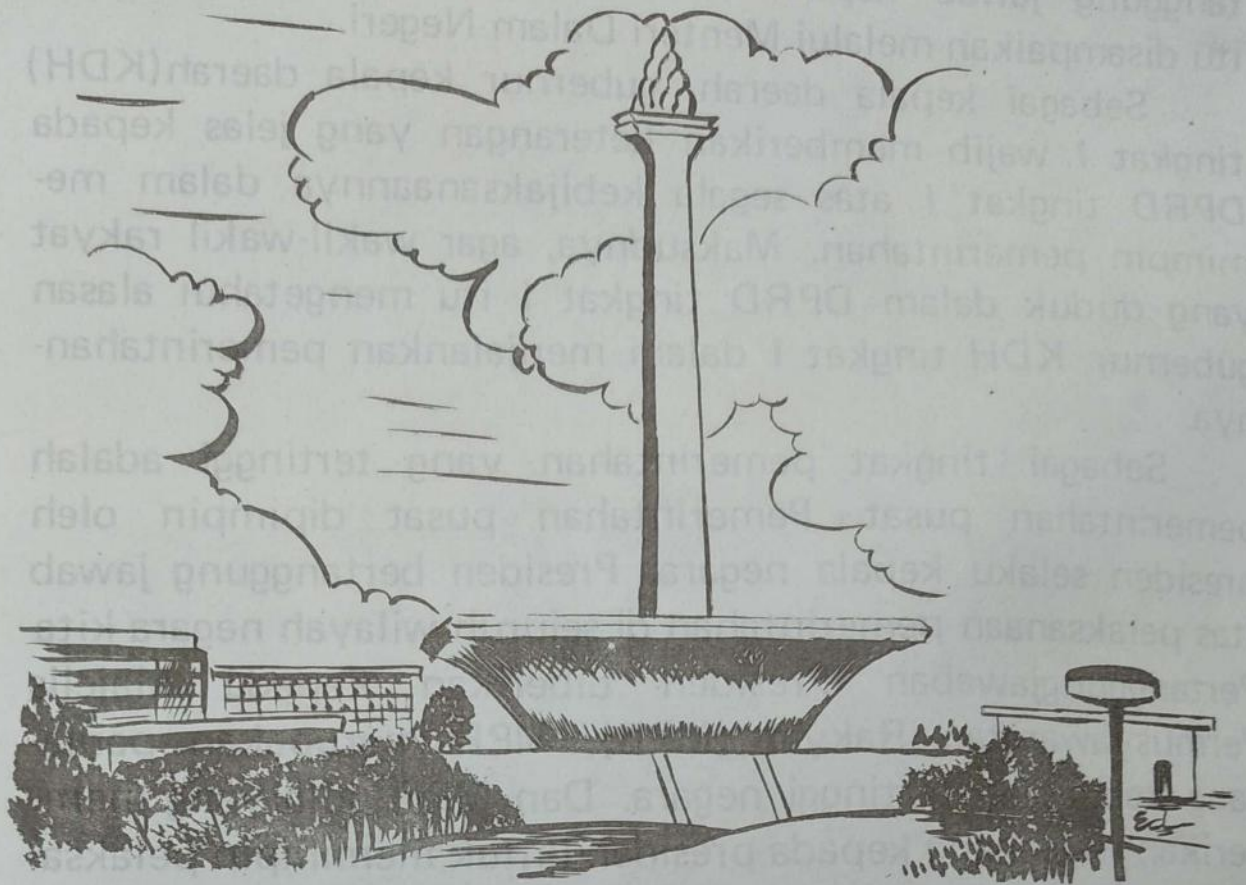
Sebagai tingkat pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden selaku kepala negara. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di seluruh wilayah negara kita. Pertanggungjawaban Presiden diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dan MPR pula yang memberikan wewenang kepada presiden untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan di seluruh Indonesia.

Mengapa MPR mempunyai kekuasaan yang begitu tinggi? Karena MPR adalah wakil seluruh rakyat Indonesia. Anggota-anggota MPR terdiri dari seluruh wakil rakyat Indonesia. Dalam negara kita, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh MPR.

Masih terdapat Lembaga-lembaga tinggi lainnya yang bekerja pada tingkat Pusat. Yang perlu kita sebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan Lembaga tinggi di pusat yang anggota-anggota terdiri dari anggota-anggota MPR. Tugas DPR adalah mengawasi pekerjaan presiden. Di samping itu Presiden perlu bekerja sama dengan DPR dalam membuat Undang-undang.

Lembaga tinggi lainnya adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Badan ini mempunyai tugas memberikan nasehat kepada presiden selaku pemerintah (pusat).





Lembaga tinggi lainnya yang penting adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Badan ini bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada pemerintah.

Demikianlah kita telah menjelajahi tingkat-tingkat pemerintahan negara kita. Masing-masing tingkat pemerintahan itu mempunyai tanggung jawab bersama. Tanggung jawab mereka adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang demikian itu merupakan cita-cita kita semua. Oleh karena itu marilah kita membantu pemerintah kita dalam pembangunan negara kita. Pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang menuju masa yang gemilang.



## Pertanyaan/tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap tepat dan tuliskan pada kertas lain!

1. Pemerintah negara kita mengenal :
  - a. tingkat-tingkat.
  - b. pemisahan.
  - c. pembagian.
2. Pemerintahan desa langsung berada di bawah . . . .
  - a. LMD.
  - b. camat.
  - c. bupati.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada . . . .
  - a. presiden.
  - b. presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  - c. menteri Dalam Negeri.
4. Presiden bertanggung jawab kepada . . . .
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat.
  - b. Mahkamah Agung.
  - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Yang memeriksa pertanggung jawaban keuangan pemerintah adalah . . . .
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  - c. Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain !

6. Siapa yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat?
7. Siapa yang menjadi Kepala Daerah Tingkat II?
8. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi Negara kita?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.



## Kunci Jawaban

1. a. tingkat-tingkat.
  2. b. camat.
  3. b. presiden melalui Menteri Dalam Negeri
  4. c. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  6. wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
  7. bupati dan walikotamadya.
  8. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- \* \* \*



## Rangkuman

Susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara bertingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat di atasnya dihubungkan oleh ikatan tanggung jawab. Tingkat pemerintahan yang terendah adalah Pemerintahan desa.

Kepala desa bertanggung jawab kepada camat. Begitu pula Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali-kotamadya.

Setiap kepala pemerintahan wajib pula memberikan penjelasan tentang pembangunan yang dilaksanakannya kepada rakyat. Di desa penjelasan itu diberikan melalui musyawarah desa dan di tingkat kabupaten oleh DPRD. Di tingkat pusat, kepala negara memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR.

Kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu pemerintah dan rakyat harus bahu membahu membangun negara kita yang indah ini.

## Tindak Lanjut

Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan Saudara tentang susunan pemerintahan Indonesia sebaiknya Saudara menghayati langsung. Pergilah ke kantor kepala desa atau kantor kecamatan di tempat Saudara. Perhatikanlah tata cara kerja mereka.

Hendaklah Saudara sering mendengar siaran radio, televisi, atau membaca surat kabar dengan acara siaran berita. Bacalah buku-buku yang berhubungan dengan pemerintahan. Bacalah pula buku Paket A58 dan Paket A90.

\* \* \*



## Kata-kata Inti

balai	Monumen Nasional
BPK	musyawarah
bupati	menteri
bijaksana	negara
cendekiawan	otonom
desa	pemerintahan
daerah	pemuka masyarakat
D.P.A.	perangkat desa
D.P.R.	pemerintahan pusat
Ibukota negara	presiden
kelompok	Propesor
Kabinet Pembangunan III	Pembantu presiden
K.D.H.	peta
kecamatan	sekretaris desa
kota administratif	tahap
kotamadya	wilayah
kabupaten	wakil presiden
Lembaga musyawarah desa	walikota
Mahkamah Agung	otonom
M.P.R.	Undang-undang
Majelis	

\* \* \*